

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

“*Technology Acceptance Model* (TAM) adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. TAM dikembangkan pada tahun 1986 oleh Fred Davis dalam tesis doktoralnya yang berjudul *A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems*” (Wicaksono, 2022:2). Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa pandangan pengguna berperan penting dalam membentuk sikap mereka terhadap pemanfaatan teknologi informasi, serta menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi tersebut terlihat pada kelompok pengguna dalam mengadopsi sistem teknologi informasi untuk mendukung aktivitas kerja (Nursiam, 2024).

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa terdapat 4 konstruk, yang mana konstruk utama dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi adalah *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* sedangkan konstruk lainnya yaitu sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*) dan niat perilaku untuk menggunakan (*behavioral intention to use*). *Perceived ease of use* merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa

menggunakan sistem tersebut bebas dari usaha yang berat. *Perceived usefulness* mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja kerjanya. Sementara itu *attitude toward use* mengacu pada sejauh mana individu menyukai atau tidak menyukai penggunaan sistem tersebut dalam menjalankan tugasnya, sedangkan *behavioral intention to use* mengacu pada seberapa besar seseorang berniat atau berencana untuk menggunakan sistem tersebut dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.

Teori ini dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini dikarenakan dalam konteks pemerintahan, seperti penerapan SIPD, Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat digunakan untuk memahami sejauh mana pengelola keuangan atau pengguna menggunakan, memanfaatkan, menyukai dan berniat menggunakan sistem tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) membantu menjelaskan apakah penerapan SIPD yang digunakan diterima secara positif dan efektif dalam mendukung tugas pengguna di sektor publik.

2.1.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD, didefinisikan sebagai administrasi data yang berkaitan dengan

pembangunan daerah, keuangan daerah, dan data lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ruang lingkup SIPD, meliputi, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya (Putri 2021).

Penerapan SIPD adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk modernisasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan. Proses ini termasuk perancangan sistem, pelatihan pengguna, integrasi data, dan pemastian keamanan data. Konsep teori perubahan sering kali dikaitkan dengan gagasan tentang penerapan sistem informasi, yang menekankan betapa pentingnya manajemen perubahan dan partisipasi pemangku kepentingan. Dalam konteks SIPD, penerapan ini dapat memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam penyediaan layanan publik di tingkat pemerintah daerah.

Menurut Dione dan Utami (2020) SIPD berperan dalam mendukung integrasi pemanfaatan data yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan di setiap instansi pemerintah. Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah,

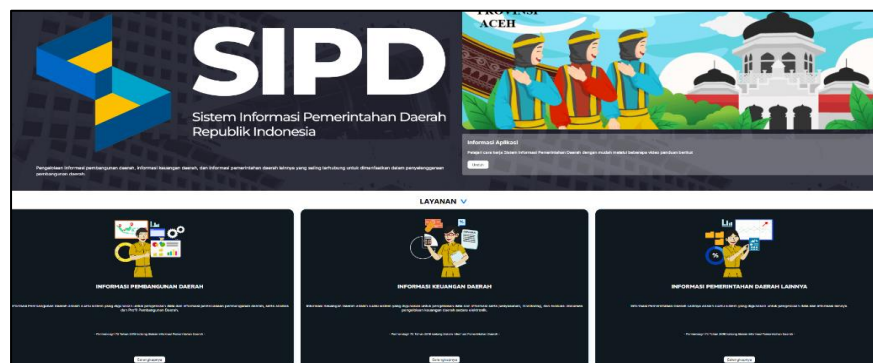
menelaah program pembangunan, serta mengkaji capaian pembangunan yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian mengenai SIPD sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa SIPD merupakan suatu sistem informasi yang berperan dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi data dan informasi pemerintahan daerah secara elektronik yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah daerah. Sistem ini juga berfungsi sebagai jejaring pengumpulan data yang terintegrasi, real time, dan berbasis online, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara rasional, efektif, dan efisien.

2.1.3 Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Adapun ruang lingkup SIPD diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang berlaku untuk berbagai tingkatan pemerintah daerah sebagai berikut:

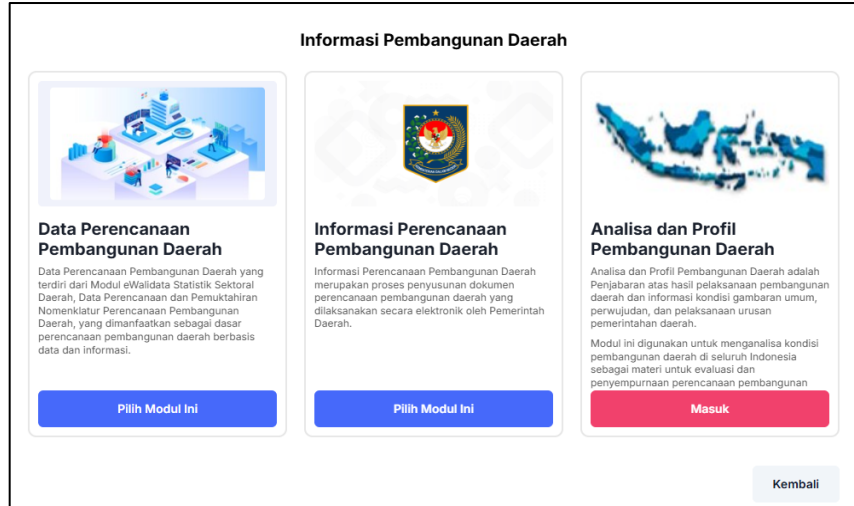
Gambar 2.1 Halaman Utama SIPD



Sumber : sipd.kemendagri.go.id/landing

a) Informasi Pembangunan Daerah

Gambar 2.2 Ruang Lingkup Informasi Pembangunan Daerah



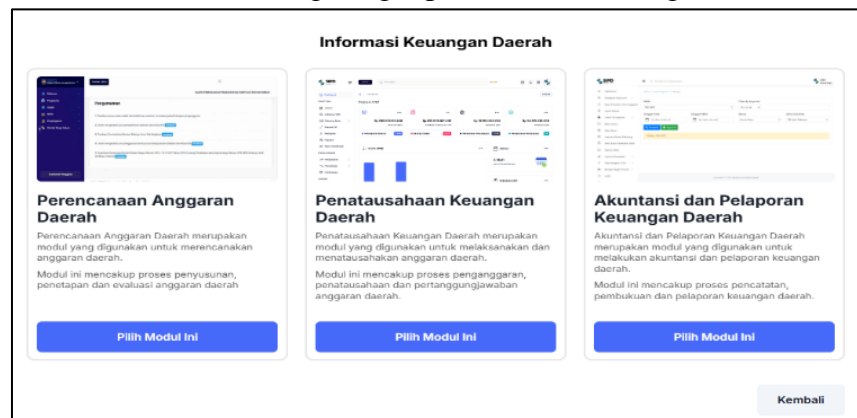
Sumber : sipd.kemendagri.go.id/landing

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Selain itu, SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan (Nasution & Nurwani 2021).

b) Informasi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem yang dimanfaatkan dalam pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, pemantauan, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Melalui SIPD, data keuangan daerah dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui keterlibatan berbagai unsur terkait, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tahapan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

Gambar 2.3 Ruang Lingkup Informasi Keuangan Daerah



Sumber : sipd.kemendagri.go.id/landing

1. Perencanaan Anggaran Daerah

SIPD memainkan peran penting dalam membantu dan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Selama tahap perencanaan dan penganggaran, SIPD membantu penyusunan anggaran dengan

memberikan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data keuangan dan informasi terkait (Nakii dkk., 2023).

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik. Adapun Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah meliputi:

- a. Pelaksanaan DPA-SKPD;
- b. Pelaksanaan Anggaran Kas dan SPD;
- c. Pelaksanaan dan penatausahaan Kas Daerah;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja; dan
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan Pembiayaan;

SIPD membantu proses penatausahaan dengan otomatisasi berbagai proses administratif, seperti pengelolaan aset daerah dan pencatatan transaksi keuangan. Keberadaan SIPD mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan ketepatan bisnis (Y. Kartika, 2023).

Menurut Wibowo dkk., (2023) bahwa penggunaan SIPD untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan berhasil dikarenakan sistem ini memiliki bahasa dan menu-menu yang mudah dipahami serta tingkat persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). SIPD juga membuat proses

penatausahaan lebih sistematis dengan menetapkan urutan yang jelas dalam pelaksanaannya.

3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah diperoleh melalui tahapan proses akuntansi serta penyusunan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan, semesteran, dan tahunan. Adapun tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Laporan Operasional ;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Tumija dkk., (2023) SIPD memungkinkan penyusunan laporan yang lebih akurat dan mudah diverifikasi pada tahap pelaporan keuangan. SIPD menyediakan laporan keuangan yang konsisten dan dapat diandalkan yang mematuhi standar akuntansi yang berlaku melalui basis data yang terintegrasi. SIPD juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, SIPD memungkinkan pemantauan pelaksanaan anggaran

secara real time, yang membantu penilaian pembangunan daerah secara logis, efisien, dan efektif (Permadi dkk., 2023).

Pengelolaan data keuangan daerah memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan di bidang keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat (Nasution & Nurwani, 2021).

c) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya. Data tambahan yang lebih luas yang berkaitan dengan administrasi tersedia melalui SIPD adalah SIPD HUB, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Gambar 2.4 Ruang Lingkup Informasi Pemerintah Daerah Lainnya



Sumber : sipd.kemendagri.go.id/landing

2.1.4 Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan elemen utama yang disajikan setiap entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibutuhkan sebagai informasi terutama dalam pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan dapat dipahami berdasarkan terminologinya, jenis, dan kualitasnya (Mallawakkang, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan dokumentasi resmi yang memuat pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran (Nurpala & Arrozi, 2023).

Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Dalam konteks

pemerintahan, laporan keuangan meliputi beberapa komponen utama, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang semuanya disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual maupun kas menuju akrual.

2.1.4.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Anjani dkk., (2024) laporan keuangan merupakan tanggung jawab pihak penyusunnya, di mana lembaga keuangan mikro lokal menyusun laporan tersebut berdasarkan siklus akuntansi yang meliputi identifikasi dokumen, pencatatan jurnal, serta periode akuntansi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah disusun dengan memperhatikan kondisi keuangan dan transaksi yang terjadi, dengan tujuan menyediakan informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan siklus akuntansi yang sesuai di lingkungan pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan atribut kualitatif laporan yang memperlihatkan kondisi keuangan, kinerja, dan informasi lainnya mengenai pemerintah daerah yang disajikan melalui akun-akun tersebut (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Kualitas pelaporan keuangan mengacu pada tanggung jawab atau kewajiban yang melekat pada penyusunan laporan keuangan. Secara esensial, kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan aspek kualitatif dari proses akuntansi, di mana akuntabilitas dan transparansi saling berdampingan (Yanti dkk., 2020). Semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan pemerintah, semakin besar tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tercipta, demikian pula sebaliknya. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 antara lain:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*): Informasi yang tersedia memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki ekspektasi yang dimiliki berdasarkan pengalaman di masa lalu;
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*): Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - c. Tepat waktu (*timeliness*): Informasi yang disampaikan secara tepat waktu memiliki pengaruh serta memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan;
 - d. Lengkap: Informasi yang disajikan mencakup seluruh data akuntansi yang berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan. Setiap informasi pendukung yang melatarbelakangi unsur utama dalam laporan keuangan diungkapkan secara jelas guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan informasi tersebut.
2. Andal, yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mengandung unsur yang menyesatkan maupun kesalahan material, mengungkapkan fakta secara jujur, serta dapat diuji kebenarannya. Informasi

yang bersifat andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur: Informasi disajikan secara jujur dalam menggambarkan transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya dilaporkan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*): Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya, dan apabila pengujian dilakukan berulang kali oleh pihak yang berbeda, hasil yang diperoleh tetap menunjukkan kesimpulan yang relatif sama;
 - c. Netralitas: Informasi disusun untuk memenuhi kepentingan umum dan tidak diarahkan untuk menguntungkan atau memihak pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya.
 4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna

serta diungkapkan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pengguna.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Akbar, Y. R., & Mar'aini, M. A. (2020)	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dalam Model Penerimaan Teknologi terhadap implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan dampaknya pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Analisis data kualitatif dengan riset kaudal dan deskriptif, Teknik pengumpulan data survey dan observasi, Teknik analisis data menggunakan analisis PLS	Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD, namun tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Keberhasilan implementasi SIPKD memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dapat memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					pemerintah daerah yang dimediasi oleh keberhasilan implementasi SIPKD
2	Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah, sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Analisis data kuantitatif, Teknik penentuan sampel purposive sampling, Metode pengumpulan data kuisisioner, metode analisis data regresi linear berganda menggunakan program smart PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi
3.	Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022)	Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi Dan Implementasi SIPD	Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi Dan	Analisis data kuantitatif, metode analisis data regresi linear berganda	Kompetensi pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa	Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa	menggunakan program SPSS	pemerintah Kota Langsa, Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa, Implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa, Kompetensi pengguna, teknologi informasi dan implementasi SIPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa.
4.	Paat, F. F., & Saleh, S. A. (2023).	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Informasi	Analisis data kuantitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh secara signifikan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi	Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi	kuesioner, Analisis data menggunakan regresi linear sederhana, Metode MSI digunakan untuk melakukan analisis yang meliputi transformasi data dari skala ordinal ke interval	terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Naufal Athallah, M. R. (2023)	Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur	Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan yang diterapkan di SIPD terutama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah	Analisis data kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Delone dan Mclean	Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih ada beberapa kendala yang dialami terutama sering terjadinya eror pada system, masih kurangnya SDM yang cukup memadai dalam mengoperasionalkan aplikasi tersebut. Dengan adanya SIPD sebetulnya sudah sangat membantu dan mempermudah proses pengerjaannya namun masih ada beberapa kendala yang memang secara perlahan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					dapat diperbaiki oleh pemerintah pusat.
6.	Toding, S., & Maria, E. (2023)	Determinan Keberterimaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Ambon menggunakan Technology Acceptance Model	Untuk menemukan bukti empiris determinan keberterimaan perangkat daerah Kota Ambon pada penerapan SIPD menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)	Analisis data kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Data analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana	Persepsi kemudahan dari pengguna SIPD berpengaruh pada persepsi penggunaan SIPD di Kota Ambon dan sikap penggunaan SIPD di Kota Ambon, serta sikap penggunaan SIPD berpengaruh pada penggunaan SIPD sesungguhnya di Kota Ambon.
7	Fitriasari, D. (2024)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja	Untuk menganalisis pengaruh penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung	Analisis data kuantitatif , landasan teori : Stakeholder Theory, Teknik penentuan sampel purposive sampling, metode analisis data regresi linear berganda menggunakan program SPSS	Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung dapat membantu mempermudah serta mempercepat penyelesaian pekerjaan dalam hal laporan keuangan serta kompetensi sumber daya

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Perangkat Daerah Kota Bandung)			manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan, meskipun variabel independen pada penelitian ini hanya mempunyai dua variabel dan waktu penelitian yang terbatas
8	Lumuly, E., & Atarwaman, R. J. (2024)	Pengaruh Implementasi Dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon)	Untuk mengetahui pengaruh implementasi dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota ambon, serta menganalisis seberapa besar pengaruh	Analisis data kuantitatif deskriptif, teknik pengumpulan data kuisisioner, Teknik pengambilan sampel purposive random sampling, metode analisis data regresi berganda menggunakan program SPSS, menggunakan teori TAM	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Namun secara simultan, efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Implementasi dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara bersamaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan		(OPD) di kota Ambon
9	Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024)	Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar.	Untuk mengetahui optimalisasi penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemanfaatan SIPD sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman, Landasan teori yang digunakan DeLone dan McLean	Penerapan SIPD di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan optimal, hal ini didasarkan pada dimensi yaitu kualitas sistem dan pelayanan yang menyangkut permasalahan trouble aplikasi yang terjadi pada pelaksanaan dari SIPD, selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola sistem tersebut turut menjadikan penggunaan pelayanan SIPD menjadi kurang optimal

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
10.	Agustina, R., Afriana, R. A., & Gustiana, R. (2024)	Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pemerinah Daerah (SIPD) Penganggaran Pada Puskesmas Di Kabupaten Barito Kuala	Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIPD Penganggaran Pada Puskesmas di Kabupaten Barito Kuala	Metode kuantitatif, dengan cara membagikan kuesioner. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25	Secara parsial variabel kualitas sistem tidak berpengaruh dan variabel kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Aplikasi SIPD Penganggaran pada Puskesmas di Kabupaten Barito Kuala. Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pengguna SIPD Penganggaran pada Puskesmas di Kabupaten Barito Kuala.
11.	Febrianti, T., & Fiddin, F. (2024)	Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Persepsi Manfaat Terhadap Kepuasan	Untuk mengetahui apakah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan persepsi manfaat berpengaruh	Pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner menggunakan metode analisis regresi linear berganda serta	Secara simultan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan persepsi manfaat berpengaruh

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Pengguna Aplikasi SIPD	terhadap kepuasan pengguna SIPD pemerintah Kabupaten Bengkalis	mneggunakan teori model kesuksesan Delone dan Mclean dan Teori TAM	terhadap kepuasan pengguna SIPD
12	Soekardi, C. P., Mattoasi, M., & Wuryandini, A. R. (2025)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.	Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo	Analisis data kuantitatif, menggunakan data primer dengan penyebaran kuisiner, metode purposive sampling, menggunakan Theory stewardship, metode analisis data regresi linear sederhana menggunakan program SPSS	Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo dengan menggunakan Stewardship Theory
13	Timang, R., Lambe, K. H., & Toding, A. (2025)	Pengaruh SIPD dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan	Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh SIPD dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas	Analisis data kuantitatif, metode pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, penentuan sample dengan teknik sampel jenuh, metode analisis data	Hasil Uji t (parsial) menunjukkan bahwa Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Perikanan Papua Tengah	Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Papua Tengah	regresi linear berganda menggunakan program SPSS	Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Papua Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SIPD yang efektif dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil Uji t (parsial) menunjukkan bahwa Kompetensi Pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Papua Tengah

Sumber: Data sekunder diolah peneliti (2025)

2.3 Kerangka Pemikiran

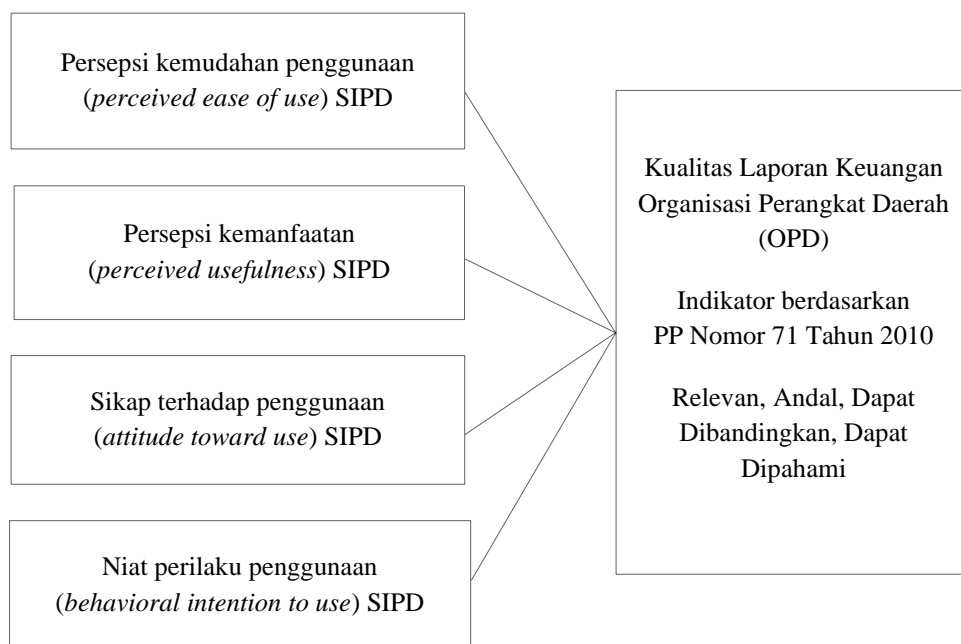
Kerangka pemikiran dari penelitian ini berangkat dari Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan, manfaat, sikap, dan niat perilaku dalam menggunakannya. Dalam konteks penelitian ini, penerapan SIPD dipandang memengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan OPD melalui empat variabel utama.

Pertama, *perceived ease of use* menggambarkan sejauh mana SIPD dianggap mudah dipahami dan dioperasikan, yang pada akhirnya memengaruhi ketepatan pengguna dalam memasukkan data keuangan. Kedua, *perceived usefulness* menunjukkan keyakinan bahwa penggunaan SIPD memberikan manfaat dalam meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efektivitas proses penyusunan laporan keuangan. Ketiga, *attitude toward use* mencerminkan sikap positif pengguna terhadap SIPD yang mendorong kesediaan dan kenyamanan dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Keempat, *behavioral intention to use* menggambarkan niat atau komitmen pengguna untuk terus menggunakan SIPD secara berkelanjutan, yang berdampak pada konsistensi penggunaan sistem serta peningkatan kualitas laporan keuangan.

Keempat variabel tersebut diposisikan sebagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang meliputi aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan demikian, semakin positif persepsi dan penerimaan

pengguna terhadap SIPD maka semakin tinggi pula peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan OPD. Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) merupakan salah satu konstruk utama dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan sejauh mana pengguna meyakini bahwa suatu sistem informasi mudah dipahami, dipelajari, dan dioperasikan. Dalam konteks penerapan SIPD, kemudahan penggunaan akan mendorong aparatur OPD untuk lebih menerima dan memanfaatkan sistem secara optimal dalam proses

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan. Ketika sistem dirasakan mudah digunakan, misalnya tampilan menu yang intuitif, proses input yang tidak rumit, dan fitur validasi yang membantu mengurangi kesalahan, maka pengguna akan lebih konsisten dalam melakukan pencatatan dan penyajian data, sehingga meningkatkan ketelitian, ketepatan waktu, dan akurasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Temuan empiris juga mendukung hubungan tersebut. Penelitian Toding dan Maria (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dari penggunaan SIPD berpengaruh pada persepsi penggunaan SIPD yang menunjang dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lumuly dan Atarwaman (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas SIPD jika dikaitkan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimana teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan tentang hubungan sebab akibat antara keyakinan akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan dalam penggunaannya.

Studi lain berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM) yang meneliti penerapan Sistem Informasi Penerapan Daerah (SIPD) di pemerintah daerah juga menemukan bahwa Persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan SIPD dalam proses pelaporan, karena pengguna yang merasa sistemnya mudah akan lebih sering menggunakan fitur secara lengkap dan sesuai prosedur. Dengan

demikian, semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh OPD terhadap SIPD maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis (H₁): Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

H_{1.0}: Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) SIPD tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar

H_{1.1}: Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) SIPD berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar

Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) merujuk pada keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja mereka. Dalam konteks SIPD, persepsi kemanfaatan sangat berkaitan dengan seberapa besar pegawai OPD merasakan manfaat konkret dari penggunaan SIPD, seperti peningkatan efisiensi penyusunan anggaran, kecepatan pemrosesan data, kemudahan rekonsiliasi, serta ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketika pengguna percaya bahwa SIPD membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih akurat, maka mereka cenderung memanfaatkan sistem secara maksimal dan mematuhi prosedur penginputan

data. Pemanfaatan SIPD yang optimal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, baik dari aspek akurasi, keandalan, kelengkapan, maupun ketepatan waktu.

Mustaqmah dan Putri (2022) dalam penelitiannya mengenai pemanfaatan SIPD menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah seperti SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, terutama karena menyederhanakan proses pencatatan dan meminimalkan kesalahan input. Studi lain berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menguji SIPD pada berbagai daerah melaporkan bahwa Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) menjadi salah satu faktor paling kuat yang mendorong penerimaan dan penggunaan sistem secara berkelanjutan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPD yang dirasakan oleh pegawai OPD, maka semakin besar peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis (H₂): Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

H_{2.0}: Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPD tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar

H_{2.1} : Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPD berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar

Sikap terhadap penggunaan (*Attitude Toward Use*) menggambarkan kecenderungan positif atau negatif pengguna dalam menerima, menyukai, dan merasa nyaman menggunakan suatu sistem informasi. Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sikap yang positif muncul ketika pegawai OPD merasa bahwa SIPD bermanfaat, mudah digunakan, dan mendukung kelancaran proses kerja mereka. Sikap positif ini mendorong pengguna untuk menggunakan SIPD secara lebih konsisten, teliti, dan sesuai prosedur, sehingga berdampak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar rasa percaya diri, kenyamanan, dan penerimaan pengguna terhadap SIPD, semakin optimal pula pemanfaatan fitur-fitur sistem dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Toding dan Maria (2023) menyatakan bahwa sikap penggunaan (*Attitude Towards Use*) berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem sesungguhnya (*Actual System Use*) dari para pengguna SIPD. Korelasi positif antara sikap penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan sistem sesungguhnya dari SIPD menunjukkan bahwa sikap positif atau sikap menyukai dari pengguna, maka pengguna akan

menggunakan SIPD secara konkret untuk menjalankan tugas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM) juga menunjukkan bahwa sikap positif terhadap penggunaan sistem informasi merupakan faktor kunci yang mendorong penggunaan aktual dan keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital. Beberapa studi yang meneliti penerimaan SIPD di pemerintah daerah juga menemukan bahwa sikap terhadap penggunaan (*Attitude Toward Use*) berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses input data, konsistensi pemakaian, dan kepatuhan terhadap alur pelaporan keuangan digital. Sikap positif terbukti memperkuat hubungan antara Persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) dan Persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) dengan pemanfaatan sistem secara efektif, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis (H3): Sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.

H_{3.0}: Sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*) SIPD tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

H_{3.1} : Sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*) SIPD berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

Niat perilaku penggunaan (*Behavioral Intention to Use*) mencerminkan sejauh mana pengguna berkeinginan dan berkomitmen untuk terus menggunakan suatu sistem informasi di masa mendatang. Dalam konteks penerapan SIPD, niat perilaku yang tinggi menunjukkan bahwa pegawai OPD memiliki dorongan internal untuk SIPD secara berkelanjutan dalam proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Ketika pengguna memiliki intensi yang kuat untuk terus memanfaatkan SIPD, maka frekuensi penggunaan sistem akan meningkat dan kualitas interaksi dengan fitur-fitur SIPD menjadi lebih baik. Penggunaan yang berkelanjutan dan konsisten ini memungkinkan pegawai semakin mahir dan teliti dalam penginputan data, mematuhi alur kerja digital, serta meminimalkan kesalahan pelaporan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Agustina dkk., (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIPD Penganggaran. Kualitas sistem dan kualitas informasi dalam SIPD berperan penting dalam membentuk kepuasan pengguna. Sistem yang andal, mudah digunakan, serta menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pegawai dalam menggunakan SIPD untuk proses penganggaran dan pelaporan keuangan.

Kepuasan pengguna ini kemudian mendorong niat perilaku penggunaan (*Behavioral Intention to use*) SIPD secara berkelanjutan, sehingga pegawai lebih konsisten, teliti, dan mematuhi prosedur penginputan dan pengolahan data.

Penelitian berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM) secara luas mendukung bahwa niat perilaku penggunaan (*Behavioral Intention to Use*) merupakan prediktor utama perilaku penggunaan aktual, termasuk dalam konteks sistem informasi pemerintahan. Studi yang dilakukan pada implementasi SIPD di sejumlah daerah juga menunjukkan bahwa pegawai dengan niat perilaku penggunaan (*Behavioral Intention to Use*) yang tinggi cenderung memanfaatkan sistem secara penuh, mengikuti prosedur secara standar, dan lebih responsif terhadap pembaruan sistem, sehingga berdampak pada meningkatnya akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian, semakin kuat intensi pegawai untuk menggunakan SIPD secara berkelanjutan, semakin besar peluang peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis keempat dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis (H₄): Niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

H_{4.0} : Niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) SIPD tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar

H_{4.1} : Niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) SIPD
berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan
OPD di Kabupaten Tanah Datar